



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 2898 / Kep-DPRD/ III / 2017

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;
 - b. bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan antara DPRD Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Medan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 171/ 3749 /Kep-DPRD/2015, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 28 Februari 2017.
 2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Medan dengan Pemerintah Daerah Kota Medan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tanggal 13 Maret 2017.
 3. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 13 Maret 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

**Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13 Maret 2017**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,**



HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH

Tembusan :

1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Peringgal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH TAHUN 2017.**

NOMOR : 171 / 2898 / Kep-DPRD/ III /2017.
TANGGAL : 13 Maret 2017.

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.	USUL EKSEKUTIF
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penanggulangan Bencana.	USUL EKSEKUTIF
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Izin Lingkungan.	USUL EKSEKUTIF
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.	USUL EKSEKUTIF
5.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	USUL EKSEKUTIF
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perubahan Retribusi Izin Usaha Perikanan.	USUL EKSEKUTIF
7.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	USUL EKSEKUTIF
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.	USUL EKSEKUTIF
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.	USUL EKSEKUTIF
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.	USUL EKSEKUTIF
11.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	USUL EKSEKUTIF
12.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.	USUL EKSEKUTIF
13.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan.	USUL EKSEKUTIF

14.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah.	USUL EKSEKUTIF
15.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021.	USUL EKSEKUTIF
16.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 Sampai Dengan 2031.	USUL EKSEKUTIF
17.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rumah Susun.	USUL EKSEKUTIF
18.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016.	USUL EKSEKUTIF
19.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017.	USUL EKSEKUTIF
20.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018.	USUL EKSEKUTIF
21.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan.	USUL EKSEKUTIF
22.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan.	USUL EKSEKUTIF
23.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.	USUL EKSEKUTIF
24.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Sistem Pendidikan di Kota Medan.	INISIATIF DPRD KOTA MEDAN
25.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Asset Daerah.	INISIATIF DPRD KOTA MEDAN
26.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.	INISIATIF DPRD KOTA MEDAN
27.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Pedagang Kecil Kota Medan.	INISIATIF DPRD KOTA MEDAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,**


HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH